



**DAFTAR PERTANYAAN PENELITIAN KEPADA SUBJEK PENELITIAN  
(NARASUMBER) DI DESA NGARGOSARI, KECAMATAN  
SAMIGALUH. KABUPATEN KULON PROGO**

A. Kepala Desa Ngargosari

1. Apakah landasan utama serta latar belakang dibentuk dan diberlakukannya Peraturan Desa No. 4 Tahun 2018 tentang Perlindungan Hutan Tanaman Rakyat dan Hijauan Makanan Ternak di Desa Ngargosari?
2. Bagaimanakah sejauh ini Peraturan Desa tersebut berlaku dan mengatur Masyarakat?
3. Terkait masih adanya warga masyarakat yang masih melanggar Peraturan Desa ini, bagaimanakah tindak lanjut dari Pemerintah Desa melalui Peraturan Desa ini?
4. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat pemberlakuan Peraturan Desa No. 4 Tahun 2018 di Desa Ngargosari?

B. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Ngargosari

1. Apakah Dasar Hukum dibentuk dan diberlakukannya Peraturan Desa No. 4 Tahun 2018 tentang Perlindungan Hutan Tanaman Rakyat dan Hijauan Makanan Ternak di Desa Ngargosari?
2. Apakah Tujuan utama dari diberlakukannya Peraturan Desa No. 4 Tahun 2018 tersebut

3. Terkait masih adanya pelanggaran, yang dapat berupa penebangan, atau perusakan lingkungan Hutan Tanaman Rakyat dengan tujuan mendapatkan Hijauan Makanan Ternak di lahan milik orang lain tanpa seijin pemilik, adakah sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku pelanggaran di dalam Peraturan Desa tersebut?
4. Apa dasar yang digunakan dalam pemberian sanksi tersebut?
5. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat pemberlakuan Peraturan Desa tersebut?

#### C. Tokoh Masyarakat

1. Apakah Peraturan Desa No. 4 Tahun 2018 tentang Perlindungan Hutan Tanaman Rakyat dan Hijauan Makanan Ternak telah dapat tersampaikan dan diterima oleh warga masyarakat di setiap Dusun nya?
2. Apakah masih terdapat warga Masyarakat yang belum mengetahui atau memahami berlakunya Peraturan Desa ini?
3. Bagaimanakah sejauh ini Peraturan Desa tersebut dapat mengatur para Petani/pekebun ataupun peternak di Desa Ngargosari?
4. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat pemberlakuan Peraturan Desa tersebut?